

KONTEKSTUALISASI FILSAFAT EKONOMI ISLAM DALAM SDGS**Aji Damanuri, Eva Rosyidah**

Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Indonesia

Email: evarosyidah3@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi pedoman krusial bagi upaya global dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Filsafat ilmu ekonomi Islam, sebagai suatu kerangka kerja alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai etika Islam, menawarkan potensi besar dalam mendukung implementasi dalam konteks penerapan SDGs. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka dan menganalisis konsep-konsep ekonomi Islam dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Populasi penelitian melibatkan literatur-literatur, artikel ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen terkait ekonomi Islam dan SDGs. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini menguraikan keterkaitan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan sosial, dengan tujuan-tujuan konkret SDGs. Meskipun begitu, pemahaman tentang kontribusi konkret filsafat ilmu ekonomi Islam dalam penerapan SDGs masih terbatas. Dengan memahami landasan filosofis ini, dapat diidentifikasi strategi dan kebijakan yang mendukung integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret dalam mengarahkan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan, sesuai dengan tujuan universal SDGs

Kata kunci: Filsafat, ekonomi Islam, SDGs (Sustainable Development Goals)**Abstract**

In the context of sustainable development, the Sustainable Development Goals (SDGs) are crucial guidelines for global efforts to address economic, social and environmental challenges. The philosophy of Islamic economics, as an alternative framework based on Islamic ethical values, offers great potential in supporting implementation in the context of implementing the SDGs. The research method used is literature research and analyzes Islamic economic concepts in relation to achieving sustainable development goals. The research population involved literature, scientific articles, books, and documents related to Islamic economics and SDGs. Through in-depth analysis, this research outlines the linkages between Islamic economic principles, such as justice, sustainability, and social empowerment, and the concrete goals of the SDGs. However, there is limited understanding of the concrete contribution of Islamic philosophy of economics to the implementation of the SDGs. By understanding this philosophical foundation, strategies and policies that support the integration of Islamic values into economic practices oriented towards sustainable development can be identified. The conclusions of this research can be the basis for concrete

How to cite:	Aji Damanuri, Eva Rosyidah (2024) Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam dalam SDGs, (06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

steps in directing a more just, sustainable and empowerment-oriented economic system, in accordance with the universal goals of the SDGs.

Keywords: *philosophy, Islamic economic, SDGs (Sustainable Development Goals)*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, tantangan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mendesak, dan masyarakat internasional menyadari perlunya mengambil tindakan kolektif. Dalam hal ini Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi panduan utama bagi komunitas internasional dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan. SDGs mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan lingkungan, ketahanan pangan dan keadilan sosial (Fleetwood, 2020). Ekonomi Islam muncul sebagai suatu paradigma yang unik dan bermanfaat dalam merespons panggilan untuk pembangunan berkelanjutan. Filsafat ilmu ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang kaya nilai, dengan akar-akarnya yang terletak dalam prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran filsafat ilmu ekonomi Islam dalam penerapan SDGs menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya diwujudkan secara ekonomis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan, berkelanjutan, dan kemanusiaan (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Namun, meskipun potensi tersebut telah diakui, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi dan memahami secara lebih rinci bagaimana filsafat ilmu ekonomi Islam dapat diintegrasikan secara konkret dalam pelaksanaan SDGs. Oleh karena itu, tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis peran kritis filsafat ilmu ekonomi Islam dalam penerapan SDGs, serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan secara global. Dengan memahami keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat ditemukan cara-cara praktis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam kedalam kebijakan dan praktik ekonomi yang mendukung pencapaian SDGs secara efektif dan berkesinambungan (Kurniawan, 2022).

Pentingnya kontekstualisasi filsafat ilmu ekonomi Islam dalam SDGs terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam ke dalam praksis ekonomi kontemporer (Nasrin & Siddiqui, 2023). Hal ini memperkaya gagasan pembangunan berkelanjutan dengan perspektif yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, lingkungan, dan spiritual. Filsafat ekonomi Islam menekankan konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, yang secara intrinsik terkait dengan SDGs (Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020). Prinsip-prinsip ini dapat memberikan panduan dalam merancang kebijakan ekonomi yang mempromosikan distribusi kekayaan yang adil, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks SDGs, filsafat ilmu ekonomi Islam menawarkan model pembangunan yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial, menghindari ketidakselarasan ekonomi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Ibrahim, Mahmud, & Wantu, 2023). Selain itu, filsafat ilmu ekonomi Islam juga mengajarkan konsep keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti kepemilikan bersama, tanggung jawab sosial, dan larangan

eksploitasi berlebihan terhadap alam, memberikan dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas, pengintegrasian difilsafat ekonomi Islam dalam SDGs juga dapat menjadi jembatan untuk memperkuat antar bangsa dan memperkaya wawasan global terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis nilai. Dengan demikian, kontekstualisasi filsafat ekonomi Islam dalam SDGs bukan hanya merupakan langkah pening untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga merupakan panggilan untuk menggabungkan kearifan lokal dengan perspektif global guna mencapai hasil yang lebih baik bagi mat manusia dan bumi kita yang tercinta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka dan menganalisis konsep-konsep ekonomi Islam dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Populasi penelitian melibatkan literatur-literatur, artikel ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen terkait ekonomi Islam dan SDGs (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara filsafat ilmu ekonomi Islam dengan implementasinya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dapat mengidentifikasi secara konsep-konsep dalam filsafat ilmu Ekonomi Islam yang dapat berperan sebagai dasar bagi kebijakan dan praktik ekonomi yang mendukung SDGs (Ridwan, 2022). Melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara integrasi yang lebih efektif antara nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan. Dengan menganalisis dampak konkret filsafat ilmu ekonomi Islam dalam pembentukan kebijakan ekonomi berkelanjutan dapat mengukur sejauh mana filsafat ilmu ekonomi Islam dapat menjadi pengaduan dalam membangun sistem ekonomi yang responsif terhadap SDGs, dengan fokus pada pencapaian keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Natalia & Maulidya, 2023).

Dengan menganalisis keselarasan nilai-nilai ekonomi Islam pada tujuan-tujuan konkret yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) akan menjelaskan sejauh mana konsep ini dapat menjadi panduan efektif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (Khan & Haneef, 2022). Dalam review ini akan menguraikan secara rinci prinsip-prinsip inti ekonomi Islam, seperti larangan riba, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dasar-dasar filsafat ilmu ekonomi Islam, diharapkan pembaca dapat menilai relevansi dan potensi kontribusi positifnya terhadap pencapaian tujuan SDGs. Untuk mengevaluasi kontribusi potensial ekonomi Islam terhadap SDGs maka perlu review dengan cakupan analisis mendalam terhadap sejauh mana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh komunitas global. Selain itu review ini akan menyelidiki tantangan dan peluang implementasi konsep-konsep ekonomi Islam dalam konteks SDGs. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan potensial dan peluang

perbaikan, tujuan ini berusaha memberikan wawasan yang tepat kepada pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan para praktisi dalam menerapkan konsep ini secara efektif dalam mendukung pencapaian SDGs (Kurnia, Alamsyahbana, Chartady, Arifin, & Sesaria, 2023).

Tujuan utama dari review ini adalah memberikan landasan konseptual untuk penelitian lebih lanjut. Dengan menyajikan pandangan komprehensif tentang hubungan antara ekonomi Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan, kami berharap mendorong penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang peran ekonomi Islam dalam mencapai SDGs. Selain itu, tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk menganalisis keselarasan nilai-nilai ekonomi Islam dengan tujuan konkret yang ditetapkan oleh PBB dalam SDGs. Fokus utama tinjauan ini adalah mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam secara positif mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan.

Tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global dan mempromosikan perkembangan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh dunia. SDGs ini terdiri dari seperangkat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda di tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi : (1) Tidak ada kemiskinan (No poverty), (2) Tidak ada kelaparan (Zero Hunger), (4) Kesehatan dan kesejahteraan (Good Health and Well-Being), (5) Pendidikan berkualitas (Quality Education), (6) Kesetaraan Gender (Gender Equality), (6) Air bersih dan sanitasi (Clean Water and Sanitation), (7) Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean energy), (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth), (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure), (10) Ketidakselarasan mengurangi (Reduced Inequalities), (11) Kota dan Permukiman yang berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities), (12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab (Responsible Consumption and Production), (13) Tindakan untuk Iklim (Climate Action), (14) Kehidupan di bawah air (Life Below Water), (15) Kehidupan di daratan (Life on land), (16) Perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat (Peace, Justice, and Strong Institutions), (17) Kemitraan untuk tujuan (Partnerships for the Goals). Setiap tujuan SDGs memiliki target-target khusus yang harus dicapai untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. SDGs bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan damai untuk semua manusia (Winkel et al., 2019).

Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat ilmu ekonomi Islam muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengembangkan kerangka kerja ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Perkembangan filsafat ekonomi Islam dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam domain ekonomi (Janah & Ghofur, 2018). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya filsafat ekonomi Islam (Istiqomah, 2019), datarannya:

1. Ajaran Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam muncul dari ajaran alquran dan hadis, yang memberikan panduan tentang cara hidup muslim dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk ekonomi. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan distribusi yang adil menjadi dasar bagi pengembangan filsafat ekonomi Islam.

2. Perkembangan perdagangan dan keuangan Islam, pada masa awal Islam, terutama pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, masyarakat muslim terlibat dalam perdagangan yang luas dan kompleks. Hal ini memicu pengembangan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mengatasi tantangan dan masalah ekonomi yang muncul.
3. Karya ulama dan cendekiawan Islam, sejumlah ulama dan mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islam. Karya-karya seperti “Kitab al-Amwal” karya Abu Ubaid al-Qasim Ibnu Sallam dan “Kitab al-kharaj” karya Abu Yusuf, yang merupakan murid Imam Abu Hanifah, menjadi sumber inspirasi untuk perkembangan ekonomi Islam (Wajdi & Lubis, 2021).
4. Pengaruh pemikiran filsafat dan etika, konsep-konsep filsafat dan etika Islam, termasuk prinsip tauhid, keadilan, dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya. Turut berkontribusi pada munculnya filsafat ekonomi Islam.
5. Pengaruh kekhalifahan Islam, pada masa kekhalifahan Islam, terutama pada masa khalifah Umar Ibnu Al-Khattab, diterapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti distribusi tanah kepada kaum kafir dan miskin.

Munculnya filsafat ekonomi Islam juga terus berkembang sering waktu dan mengalami revitalisasi pada abad ke-20 dan ke-21 (Sugiharto, 2019). Sejalan dengan upaya untuk memahami dan merespons tantangan ekonomi modern. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim telah mencoba mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan mereka.

Filsafat ekonomi Islam mencerminkan kerangka konseptual yang unik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari ajaran agama Islam. Pada intinya, filsafat ini menekankan pada konsep distribusi keadilan, keberkahan dan keberlanjutan ekonomi (Muzakki, 2023). Prinsip dasar filsafat ekonomi islami teretak pada konsep utama seperti syariah (hukum Islam), akhlak (moralitas) dan adil (keadilan) (Javaid & ul Hassan, 2013). Pertama syariah membentuk landasan utama dengan mengatur norma-norma etika dan hukum yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi. Kedua, akhlak memainkan peran penting dengan menekankan pentingnya etika bisnis, kejujuran dan kewajiban sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi. Terakhir, prinsip keadilan menciptakan landasan untuk distribusi yang adi dari kekayaan dan sumber daya, dengan memberikan perhatian khusus kepada kaum yang kurang mampu. Dengan demikian, filsafat ekonomi Islam tidak hanya merinci prinsip etika bisnis, tetapi juga memberikan pandangan holistik yang menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Konteks sejarah dan pengembangan filsafat ekonomi Islam

Sejarah dan perkembangan filsafat ekonomi Islam merentang jauh ke masa lampau, mencerminkan warisan intelektual yang kaya dari peradaban Islam. Akarnya dapat ditelusuri hingga ke masa hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang memberikan pedoman awal bagi sistem ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Selanjutnya masa khalifah Rasyidin juga menyaksikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi

Islam dalam bentuk zakat, wakaf, dan distribusi keadilan (Muhtadi et al., 2023). Kemudian, karya-karya ulama terkenal seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Khaldun memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori ekonomi Islam selama periode kejayaan intelektual Islam. Selama berabad-abad, para ilmuwan dan pemikir muslim terus memperkaya filsafat ekonomi Islam, mengintegrasikan ide-ide dari berbagai aliran pemikiran ekonomi, seperti ekonomi politik dan teori keadilan distributor. Pemikir ekonomi Islam juga tumbuh melalui tulisan-tulisan ulama kontemporer, yang merespons tantangan dan dinamika ekonomi modern (Muhtadi et al., 2023). Oleh karena itu konteks sejarah dan perkembangan filsafat ekonomi Islam mencerminkan perjalanan panjang dan warisan intelektual yang kaya, yang terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Peran Ideologi Dalam Munculnya Ekonomi Islam

Kemunculan ilmu ekonomi Islam sangat dipengaruhi adanya sebuah ideologi karena ideologi tersebut membentuk dasar filosofi dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi penyelidikan dan perkembangan konsep ekonomi dalam tradisi Islam. Ideologi Islam, yang mencakup prinsip-prinsip agama, etika, dan hukum Islam, memberikan arahan dalam merancang suatu sistem ekonomi yang memadukan kebutuhan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan sosial (Ahadiya, 2022). Berikut adalah beberapa poin pentingnya ideologi dalam munculnya ilmu ekonomi Islam:

1. Mengarahkan prinsip-prinsip etis, ideologi Islam menyediakan kerangka kerja etis yang membimbing perilaku ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan dan kebersamaan menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana sumber daya dan kekayaan ekonomi harus dikelola.
2. Menyeimbangkan peran individu dan masyarakat, ideologi Islam mengajarkan konsep tanggung jawab sosial dan peran masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama. Ilmu ekonomi Islam, berdasarkan ideologi ini, mencoba mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam analisis ekonomi.
3. Memahami peran individu dan masyarakat, ideologi Islam mengajarkan konsep tanggung jawab sosial dan peran masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama. Ilmu ekonomi Islam, berdasarkan ideologi ini, mencoba mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam analisis ekonomi.
4. Memberikan alternatif untuk sistem ekonomi, ideologi Islam memberikan dasar untuk merancang suatu sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan.
5. Menyesuaikan diri dengan prinsip hukum Islam, ilmu ekonomi Islam berakar pada prinsip hukum Islam, yang mencakup larangan riba (bunga), larangan spekulasi yang tidak jelas, dan orientasi pada keadilan kontrak. Ini memberikan dasar hukum etis bagi praktik ekonomi Islam.
6. Memberikan konteks spiritual, ideologi Islam menambah dimensi spiritual dalam pemahaman ekonomi. Konsep-konsep seperti zakat (sumbangan wajib) dan keadilan ekonomi menjadi bagian integral dari pemikiran ekonomi Islam yang diilhami dari pemikiran ekonomi Islam yang bernilai agama.

7. Mendorong inovasi dan penelitian, ideologi Islam memberikan dorongan untuk mengembangkan pemikiran ekonomi yang unik dan relevan dengan konteks budaya dan agama. Hal ini mendorong inovasi dan penelitian dalam ilmu ekonomi Islam.

Pentingnya ideologi dalam konteks ilmu ekonomi Islam mengilhami kerangka kerja yang holistik dan terintegrasi, yang bukan hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, sosial, dan spiritual dalam pengembangan konsep ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Konsep ekonomi Islam tidak secara eksklusif diatribusikan kepada satu filsuf atau pemikir tunggal, melainkan lebih merupakan hasil dari interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang muncul dari ajaran Alquran dan hadis. Pemikiran ekonomi Islam berkembang sepanjang sejarah Islam dan melibatkan kontribusi banyak filosof, ulama, dan pemikir ekonomi Islam. Beberapa tokoh kunci yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep ekonomi Islam.

Unsur dan Kaidah Ekonomi Islam

unsur dan kaidah ekonomi Islam membentuk fondasi yang kuat dalam sistem ekonomi Islam, menciptakan kerangka yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Salah satu unsur utama adalah larangan terhadap riba (bunga), yang diintegrasikan dalam Alquran sebagai praktik yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip keadilan. Kaidah ini memandang uang sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai, bukan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko (Mansur, 2009). Selanjutnya, unsur keadilan sosial menjadi pijakan penting dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan utama Islam adalah pelaksanaan keadilan karena keadilan sosial tertanam dalam Islam (Rahim, 2013). Prinsip pembagian kekayaan secara adil, dikenai sebagai zakat, infak, dan sadaqah, memastikan distribusi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemahaman ini merangkul konsep kepemilikan umum atas sumber daya alam dan produksi untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan memahami dan menerapkan unsur dan kaidah ekonomi Islam, masyarakat yang mengimplementasikan SDGs diharapkan dapat memperkuat dimensi etis dan berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Ini tidak hanya menciptakan ekonomi yang lebih adil, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, mendukung visi SDGs untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan.

SDGS : Pengenalan dan konteks global

SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian target global yang disepakati oleh anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga tahun 2030. SDGs berfokus pada berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dirancang untuk mengatasi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia (Ngoyo, 2015).

1. Tidak ada kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk di seluruh dunia.

2. Tidak ada kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai kesehatan pangan, gizi yang baik dan promosi pertanian berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan: menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
4. Pendidikan berkualitas: memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas, promosi kesetaraan gender, dan fasilitas kesempatan pembelajaran sepanjang hayat.
5. Kesetaraan gender: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan serta anak perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi: memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Energi terjangkau dan bersih: memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, bersih, dan berkelanjutan.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pekerjaan layak, dan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur: meningkatkan infrastruktur, promosi industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Kurangi ketidakselarasan: mengurangi ketidakselarasan di dalam dan di antara negara.
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan: membuat kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan: memastikan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Tindakan terhadap perubahan iklim: mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan di bawah air: melestarikan kehidupan di bawah air dan ekosistem laut.
15. Kehidupan di darat: melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan berkelanjutan bagi ekosistem darat.
16. Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat: mempromosikan perdamaian, keadilan, dan lembaga-lembaga yang efektif.
17. Kemitraan untuk tujuan: memperkuat aliansi global untuk mencapai tujuan pembangunan.

SDGs mencerminkan komitmen global untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini, dan tujuan-tujuan tersebut saling terkait untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Fokus penting agenda pembangunan global dalam tujuan sdgs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki peran krusial di dalam agenda pembangunan global. Beberapa acara SDGs menjadi fokus penting dalam pembangunan global (Ishatono & Raharjo, 2016). Dalam pendekatan Holistik, SDGs mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Selain itu, universalitas dan kesetaraan, SDGs dirancang untuk mencakup semua negara dan masyarakat, tanpa memandang tingkat pembangunan atau ukuran ekonomi. Prinsip kesetaraan ini memastikan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk

mencapai tujuan pembangunan sesuai kapasitasnya. Pentingnya kerja sama internasional SDGs menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Negara-negara diharapkan bekerja sama, berbagai sumber daya, dan mengatasi tantangan bersama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Serta pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan inklusivitas. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memastikan keadilan gender adalah bagian integral dari tujuan-tujuan tersebut (Nhamo, Dube, & Chikodzi, 2020).

Tanggung jawab sektor swasta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mengajak sektor swasta untuk kontribusi. Keterlibatan bisnis dalam praktik bisnis berkelanjutan, investasi yang bertanggung jawab, dan inovasi yang mendukung tujuan-tujuan SDGs menjadi hal penting. Penanganan tantangan global bersama merespons tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, ketidakselarasan, dan kemiskinan. Dengan menyatukan upaya global, SDGs menciptakan platform untuk menanggapi masalah-masalah ini secara bersama-sama. Setiap SDGs memiliki indikator kerja yang terukur. Hal ini memungkinkan pemantauan progres dan evaluasi dampak, sehingga dapat dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada tujuan-tujuan ini, SDGs menjadi roadmap yang kuat untuk membimbing negara-negara dan organisasi dalam upaya mereka mencapai pembangunan berkelanjutan menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan dan inklusif (ESCAP, 2020).

Keterkaitan antara filsafat ekonomi islam dan SDGs

Tabel 1 analisis mengenai sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam mendukung atau mencocokkan dengan tujuan SDGs

No.	Tujuan SDGs	Ekonomi Islam	SDGs
1.	Penghapusan kemiskinan	Zakat, salah satu pilar utama ekonomi Islam, secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan melalui distribusi kekayaan yang adil.	Nilai ini mencocokkan dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dengan memastikan bahwa keuntungan ekonomi didistribusikan secara adil dan efektif.
2.	Kesehatan yang baik dan kesejahteraan	Mendorong pendekatan yang memperlihatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan dan ketahanan pangan.	Memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi semua, menekankan pencegahan penyakit dan akses layanan kesehatan yang merata.
3.	Pendidikan berkualitas	Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pengetahuan sebagai investasi jangka panjang.	Mengadvokasi pendidikan berkualitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan.
4.	Kesejahteraan dan kesetaraan Gender	Mendorong kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam transaksi	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

No.	Tujuan SDGs	Ekonomi Islam	SDGs
		ekonomi.	
5.	Air bersih dan sanitasi	Menyongkong prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi.	Menargetkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman.
6.	Energi terjangkau dan bersih	Mendorong pengembangan sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan.	Menekankan akses terhadap energi terjangkau, bersih, dan berkelanjutan.
7.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Menekankan keadilan dalam hubungan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.	Mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDGs. Dalam keseluruhan, kesejajaran antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tujuan-tujuan SDGs menciptakan kesempatan untuk kolaborasi yang lebih besar dan mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Studi kasus atau contoh konkret yang mengilustrasikan implementasi prinsip ekonomi Islam dalam mencapai SDGs.

Salah satu contoh nyata yang dapat mengaplikasikan prinsip ekonomi Islam dalam mencapai SDGs dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan pada salah satu Bank Syariah. Dalam studi tersebut, Bank Syariah terlibat dalam pembiayaan produktif untuk UMKM sebagai upaya mencapai SDGs. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, melibatkan berbagai pihak, di antaranya lembaga yang relevan dan sejalan dengan SDGs, seperti lembaga keuangan mikro syariah. Keduanya memiliki tujuan serupa, yaitu memberikan tujuan untuk mencapai kesetaraan ekonomi, dan kehadiran lembaga keuangan mikro syariah memberikan akses pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah. Salah satu pencapaian yang ingin dicapai dalam SDGs dalam bidang ekonomi adalah kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan. Bank syariah menjadi bagian yang dapat mewujudkan tujuan SDGs tersebut dengan meningkatkan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat menyalurkan pembiayaan produktif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui pembiayaan produktif untuk UMKM, bank syariah tidak hanya memberikan akses layanan keuangan tetapi juga memberikan peluang untuk perkembangan ekonomi masyarakat bawah. Pembiayaan produktif yang diberikan kepada para pelaku UMKM akan meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan, sehingga perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati oleh para pengusaha besar saja (Trimulato, Syamsu, & Octaviany, 2021).

Keunggulan dan tantangan Implementasi filsafat ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip ekonomi Islam dalam mencapai SDGs ada pada penerapan prinsip ekonomi Islam dalam mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan (SDGs) memberikan sejumlah manfaat yang dapat membantu mempercepat progres pembangunan berkelanjutan. Dalam prinsip keadilan sosial ekonomi dalam ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap peluang ekonomi. Konsep keberlanjutan dalam ekonomi Islam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi saat ini dan masa depan. Begitu juga zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam menyediakan dana untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam dapat memperkuat tata kelola yang baik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan prinsip ekonomi Islam tidak hanya menciptakan fondasi ekonomi yang kuat, tetapi juga secara substansial mendukung upaya global dalam mencapai SDGs untuk mewujudkan upaya global dalam mencapai SDGs untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu prinsip ekonomi Islam juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDGs dengan menciptakan kerangka kerja inklusif, berkelanjutan, dan adil. Ini mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai ekonomi Islam dan tujuan-tujuan pembangunan global yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan damai.

Tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan

Mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan tidaklah tanpa tantangan.

Tabel 2 tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam upaya ini (Puadi & Alvito, 2023)

No.	Hal-hal yang akan muncul	Tantangan	Hambatan
1.	Kesadaran dan pemahaman	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, pemimpin, dan pelaku bisnis terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.	Tidak adanya kesadaran dapat menghambat penerapan nilai-nilai ekonomi Islam karena pihak terkait mungkin tidak memahami manfaatnya secara menyeluruh.
2.	Ketidakpastian hukum dan regulasi	Beberapa negara mungkin tidak memiliki kerangka hukum yang jelas atau mendukung bagi lembaga keuangan dan bisnis berbasis ekonomi Islam.	kurangnya kepastian hukum dapat menjadi hambatan untuk perkembangan institusi ekonomi Islam dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam
3.	Kurangnya infrastruktur keuangan Syariah	Kurangnya infrastruktur keuangan syariah yang memadai, termasuk lembaga keuangan dan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi	Keberhasilan penerapan ekonomi Islam memerlukan infrastruktur keuangan yang kuat untuk mendukung aktivitas perbankan, pembiayaan, dan investasi Syariah.

No.	Hal-hal yang akan muncul	Tantangan	Hambatan
		Islam.	
4.	Pendekatan konvensional yang menonjol	Dominasi sistem keuangan dan bisnis konvensional yang mungkin menghambat perkembangan ekonomi Islam.	Perbedaan dalam pendekatan bisnis dan keuangan konvensional dapat membuat sulit bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mendapatkan tempat yang setara atau mendapatkan dukungan yang cukup.
5.	Pentingnya pendidikan dan literasi ekonomi Islam	Kurangnya pendidikan dan literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan pengambil kebijakan.	Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat dan pelaku bisnis mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi nilai-nilai ekonomi Islam.
6.	Tantangan eksternal, seperti perubahan iklim dan krisis keuangan	Faktor eksternal seperti perubahan iklim atau krisis keuangan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam.	Tantangan ini dapat memerlukan adaptasi dan respons yang cepat untuk memastikan kelangsungan prinsip-prinsip ekonomi Islam ditengah dinamika global.
7.	Kesulitan dalam pengukuran dan penilaian kerja	Pengukuran dan penilaian kerja organisasi berbasis ekonomi Islam mungkin sulit, terutama ketika menggunakan kerangka kerja yang lebih umum untuk menilai dampak pembangunan berkelanjutan	Kesulitan ini dapat menghambat kemampuan untuk membuktikan dan mengkomunikasikan dampak positif dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Melalui pemahaman dan penanganan tantangan ini, implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam agenda pembangunan berkelanjutan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kesadaran, edukasi, dan dukungan regulatif yang memadai akan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini.

Pemikiran kritis terhadap keterkaitan filsafat ekonomi Islam dan SDGs

Pemikiran kritis terhadap keterkaitan filsafat ekonomi Islam dan SDGs memunculkan kebutuhan untuk menjalani analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang merangkai keduanya. Dalam hal keadilan sosial dan redistribusi ekonomi, filsafat ekonomi Islam menekankan konsep zakat, infak, dan Sadakah sebagai instrumen utama (Sarkawi, Abdullah, & Dali, 2016). Sejauh mana prinsip-prinsip ini mampu merespons tantangan ketidaksiharasan dan kemiskinan yang dikejar oleh SDGs. Sementara itu, dalam dominan sistem keuangan dan investasi berkelanjutan, yang diadvokasi oleh ekonomi Islam melibatkan penghindaran riba dan investasi yang sesuai dengan prinsip etika. Bagaimana kontribusi sistem keuangan ini dapat memperkaya kerangka investasi berkelanjutan yang menjadi fokus SDGs. Selanjutnya,

aspek lingkungan dan etika pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi Islam menawarkan pandangan yang unik. Se jauh mana konsep khalifah dan etika lingkungan dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan. Melalui analisis kritis terhadap pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan partisipasi masyarakat, kita dapat mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam dapat mendukung pencapaian SDGs terkait dengan aspek-aspek ini. Dengan demikian, pemikiran kritis ini memberikan landasan untuk memahami potensi sinergi dan tantangan yang harus diatasi dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dengan upaya global mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pandangan atau pemikiran yang mungkin kontroversial atau kontes di bidang ini

Pemikiran kritis terhadap keterkaitan filsafat ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs) mungkin mencuatkan pandangan kontroversial terkait dengan implementasi prinsip-prinsip Islam dalam konteks pembangunan global. Sebagai contoh, sebagai kritikus dapat menyoro ti bahwa aspek-aspek seperti larangan riba dan konsep distribusi kekayaan melalui zakat, meskipun sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mungkin kurang sesuai atau praktis dalam skala pembangunan ekonomi yang besar. Mereka mungkin muncul dalam konteks pemberdayaan perempuan, di mana beberapa kalangan dapat menganggap bahwa interpretasi nilai-nilai Islam mungkin tidak sejalan sepenuhnya dengan pandangan kesertaan gender sebagaimana diusung oleh SDGs. Oleh karena itu, pemikiran kritis ini tidak hanya mencari sinergi, tetapi juga menghadapi pertanyaan kritis tentang sejauh mana filsafat ekonomi Islam dapat disesuaikan dan diintegrasikan secara harmonis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global, yang mungkin melibatkan negosiasi dan interpretasi ulang nilai-nilai tradisional dalam konteks kontemporer yang kompleks.

Selain itu, dalam pandangan kritis terhadap keterkaitan filsafat ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh tokoh-tokoh Islam juga ikut serta andil dalam kontekstualisasinya. Berikut adalah tokoh-tokoh yang andil dalam hal ini, yaitu:

Baqir Al-Sadr (1935-1980), Muhammad Baqir al-Sadr adalah seorang cendekiawan dan pemikir ekonomi Islam yang memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pemikiran ekonomi Islam pada abad ke-20. Pemikiran kritis terhadap keterkaitan filsafat ilmu ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs) dapat menghadirkan pandangan yang mungkin kontroversial. Baqir as sadr dikenal karena konsepnya tentang “Wilayah Agama” yang menekankan bahwa semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Perspektif ini mungkin memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana level intervensi dan regulasi pemerintah dalam ekonomi sesuai dengan prinsi[-prinsip pasar bebas yang dianut oleh SDGs.

Selain itu, Baqir as sadr juga menyoro ti pentingnya kepemilikan umum atas sumber daya dan produksi untuk mencapai keadilan ekonomi. Konsep ini dapat menimbulkan pertentangan dengan mdel ekonomi yang lebih mementingkan kepemilikan pribadi dan pasar yang efisien, sebagaimana diusung oleh sebagian pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pandangan Baqir As sadr juga menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan distribusi kekayaan yang adil. Ini mungkin menentang sistem ekonomi global yang terkadang

cenderung memperpetuasi ketidaksetaraan. Sadr memperkenalkan sistem dan metode ekonomi Islam yang mandiri, yang tidak mencatek metode kapitalis maupun sosialis. Sadr memperkenalkan apa yang disebut “iqtishaduna (ekonomi kita, ekonomi Islam)”. Terminologi iqtishad tersebut memang belum terlalu populer. Iqtishad dapat berarti lurus, mencari keuntungan tanpa menindas orang (golongan) lain, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda-beda (Byarwati & Sawarjuwono, 2013). Oleh karena itu, pandangan As Sadr dapat mengeksplorasi konsep ekonomi Islam yang lebih radikal dan kontroversial dalam rangka mencapai tujuan SDGs, terutama dalam konteks global yang heterogen dan kompleks. Meskipun Sadr tidak secara eksplisit membahas SDGs, pemikiran yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai beberapa tujuan SDGs. Pemikirannya menyoroti pentingnya nilai-nilai etis dalam ekonomi dan kebutuhan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ibnu Khaldun (abad ke-14), pemikiran kritis terhadap keterkaitan filsafat ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs) dapat menghindarkan pandangan kontroversial jika dilihat melalui lensa pemikiran Ibnu Khaldun, seseorang cendekiawan muslim abad ke-14 yang terkenal dengan karyanya “Muqodimah”. Ibnu Khaldun memiliki pandangan bahwa kejayaan dan kemunduran suatu peradaban bergantung pada konsep “As Abiyyah” atau soliditas sosial. Dalam konteks ekonomi, Ibnu Khaldun mungkin menyoroti bahwa implementasi prinsip-prinsip Islam, seperti zakat dan larangan riba, hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki tingkat kesatuan dan solidaritas yang cukup tinggi. Pandangannya ini dapat memunculkan kontroversi karena mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana masyarakat muslim saat ini memiliki tingkat kesatuan dan kepatuhan yang memadai terhadap nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Ibn Khaldun juga menyoroti bahwa peradaban cenderung mengalami siklus kenaikan dan penurunan, yang bisa saja mempertanyakan ketahanan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam jangka panjang (Huda, 2013). Oleh karena itu, pandangan Ibn Khaldun memberikan dimensi kritis yang mengajak untuk merefleksikan filsafat ekonomi Islam dan SDGs, yang pada gilirannya dapat menimbulkan perdebatan tentang relevansi dan implementasi konsep-konsep tersebut dalam realitas kontemporer.

Ibn Taymiyyah (abad ke-14), Pemikiran kritis terhadap keterkaitan filsafat ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui perspektif pemikiran Ibn Taymiyyah, seseorang ulama dan filosof Islam abad ke-14, mungkin mencetuskan pandangan kontroversial. Ibn Taymiyyah dikenal karena pandangan konservatifnya dan penekanannya pada interpretasi tekstual hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, pandangan Ibn Taymiyyah mungkin menekankan pada kesederhanaan dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini dapat menciptakan ketegangan dengan beberapa elemen SDGs yang menekankan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, pandangan ketat terhadap larangan riba mungkin menciptakan ketidaksepakatan, karena strategi keuangan modern yang terkadang melibatkan instrumen keuangan yang dapat dianggap ribawi (Awalia, 2022). Pandangan Ibn Taymiyyah yang lebih konservatif dan teologis juga dapat memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pemberdayaan perempuan dan aspek-aspek kehidupan sosial

yang diusung SDGs dapat disesuaikan dengan tafsir tradisional Islam. Dengan demikian, pemikiran kritis yang melibatkan pandangan Ibn Taymiyya dalam keterkaitan ini dapat menimbulkan kontroversi dan menantang pemahaman lebih luas tentang bagaimana filsafat ekonomi Islam dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Pandangan masa depan dan rekomendasi

eksplorasi potensi peran ekonomi Islam dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dimasa depan menjanjikan kontribusi signifikan terhadap kerangka global pembangunan. Dengan nilai-nilai inti seperti keadilan sosial, etika, dan keberlanjutan lingkungan, ekonomi Islam dapat menjadi kekuatan penggerak transformasi positif. Salah satu aspek kunci yang perlu dieksplorasi adalah pengembangan instrumen keuangan Islam yang Inovatif, yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mendukung investasi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam di tingkat global juga dapat menjadi kunci untuk membangun pemahaman bersama dan mendorong integrasi yang lebih baik. Selain itu, kerja sama antar negara dan lembaga keuangan Islam dapat diperkuat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Rekomendasi praktis mencakup pembentukan regulasi yang mendukung ekonomi Islam, penguatan infrastruktur keuangan syariah dan promosi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam hal ini, kolaborasi antara negara-negara dengan sistem ekonomi Islam dan lembaga-lembaga global, termasuk badan-badan pembangunan, akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah-langkah ini,, potensi peran ekonomi Islam dapat menjadi pendorong penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dimasa depan.

Untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi Islam dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), beberapa langkah kebijakan regulasi yang mendukung ekonomi Islam perlu diutamakan. Pemerintah perlu merancang dan melaksanakan kebijakan yang memberikan insentif dan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah serta memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam diakomodasikan dalam regulasi ekonomi nasional. Kedua, pendidikan dan pemahaman tentang ekonomi Islam perlu ditingkatkan secara luas, program-program pendidikan formal dan informal harus mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi Islam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan profesional terkait. Hal ini dapat membantu menghilangkan stereotip dan meningkatkan penerimaan terhadap model ekonomi ini. Selanjutnya, perlu diberikan dukungan substansial untuk pengembangan produk dan instrumen keuangan Islam inovatif yang mendukung SDGs.. lembaga-lembaga keuangan Islam dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional dan badan-badan pembangunan untuk merancang produk-produk yang mempromosikan investasi berkelanjutan, inklusi keuangan, dan pengentasan kemiskinan.

Kemudian advokasi dan diplomasi ekonomi Islam di tingkat internasional juga penting. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam dapat memainkan peran aktif dalam mempromosikan kerja antar negara, pertukaran pengetahuan, dan harmonisasi kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam serta pencapaian DGs secara global. Terakhir, pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil, perlu

terlibat dalam dialog terbuka untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dapat memperkuat implementasi langkah-langkah ini dan menjadikan ekonomi Islam sebagai kekuatan yang efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, kontekstualisasi filsafat ekonomi Islam dalam Sustainable Development Goals (SDGs) menghasilkan temuan-temuan signifikan yang dapat membentuk pandangan holistik terhadap implementasi prinsip-prinsip Islam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan global. Temuan utama mencakup kontribusi ekonomi Islam dan tokoh-tokoh atau cendekiawan muslim terhadap pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, larangan riba sehingga dapat meningkatkan kesetaraan dan distribusi kekayaan, mendukung inklusi keuangan, serta keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang ditekankan oleh ekonomi Islam memperkuat upaya menuju SDGs terkait ketidaksetaraan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, prinsip keberlanjutan lingkungan dalam ekonomi Islam memiliki implikasi positif terhadap tujuan SDGs terkait dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun telah dilakukan upaya untuk menggabungkan filsafat ini ke dalam agenda global SDGs, ajakan untuk penelitian lebih lanjut dan tindakan lanjutan tetap relevan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi implikasi dan efektivitas implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mencapai setiap target SDGs secara rinci. Perkembangan lebih lanjut dalam literatur dan riset dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara optimal dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kontekstualisasi filsafat ekonomi Islam dalam SDGs menawarkan panggung untuk transformasi positif dalam cara kita memahami dan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Dalam menyongsong masa depan, undangan untuk penelitian lebih lanjut dan tindakan konkret harus menjadi landasan bagi upaya bersama menuju ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Adlini, Miza Nina, Dinda, Anisya Hanifa, Yulinda, Sarah, Chotimah, Octavia, & Merliyana, Sauda Julia. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ahadiya, Ikrima Amira. (2022). Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 17–36.
- Awalia, Riska. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 63–78.
- Byarwati, Anis, & Sawarjuwono, Tjiptohadi. (2013). Ekonomi Islam atau Iqtishad? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 14–24.
- ESCAP, U. N. (2020). *Third South Asia Forum on the Sustainable Development Goals Dhaka, 8-9 December 2019*.
- Fleetwood, Janet. (2020). Social justice, food loss, and the sustainable development goals in the era of COVID-19. *Sustainability*, 12(12), 5027.
- Huda, Choirul. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun.

- Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103–124.
- Ibrahim, Nurinda, Mahmud, Ramli, & Wantu, Sastro M. (2023). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5360–5374.
- Ishatono, Ishatono, & Raharjo, Santoso Tri. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Istiqomah, Lailatul. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–19.
- Janah, Nasitotul, & Ghofur, Abdul. (2018). Maqashid as-ayari'ah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam. *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192.
- Javaid, Omar, & ul Hassan, Mehboob. (2013). A comparison of Islamic and capitalist conception of economic justice. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 21(1).
- Khan, Foyasal, & Haneef, Mohamed Aslam. (2022). Religious responses to sustainable development goals: An islamic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–180.
- Kurnia, Sri, Alamsyahbana, Muhammad Isa, Chartady, Rachmad, Arifin, Surya Violita, & Sesaria, Mohammad Iqbal. (2023). Circular Solutions for Decent Work and Economic Growth: Lessons from Sustainable Development Goals (SDG) 8. *Academia Open*, 8(1), 10–21070.
- Kurniawan, Toni. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133.
- Mansur, Ahmad. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(1), 155–179.
- Muhtadi, Ridan, Luthfi, Faishol, Rukmana, Arief Yanto, Hamilunniám, Moh, Nugroho, Lucky, & Sunjoto, Arie Rachmat. (2023). Menelusuri Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Get Press Indonesia.
- Muthmainnah, Lailiy, Mustansyir, Rizal, & Tjahyadi, Sindung. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23–45.
- Muzakki, Zubairi. (2023). Integrasi Ilmu Ekonomi Islam dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(1), 51–74.
- Nasrin, & Siddiqui, Mohammad Shaheer. (2023). Need a Philosophy of Teacher Education: Perusing the Praxis and Policies. In *Teaching and Teacher Education in India: Perspectives, Concerns and Trends* (pp. 49–59). Springer.
- Natalia, Angga, & Maulidya, Erine Nur. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–41.
- Ngoyo, Muhammad Fardan. (2015). Mengawal sustainable development goals (SDGs); meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(1).
- Nhamo, Godwell, Dube, Kaitano, & Chikodzi, David. (2020). Sustainable development goals: Concept and challenges of global development goal setting. *Handbook of Global Health*, 1–40.

- Puadi, Ruslan, & Alvito, Romy Fajar. (2023). Peran Agama Islam Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 689–699.
- Rahim, Shafinah. (2013). Distributive justice: a perspective from islamic economics literature. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 1(3), 77–99.
- Ridwan, Irwan Fauzy. (2022). Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals. *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–16.
- Sarkawi, Azila Ahmad, Abdullah, Alias, & Dali, Norimah Md. (2016). The concept of sustainability from the Islamic perspectives. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(5), 112–116.
- Sugiharto, Bambang. (2019). *Kebudayaan dan kondisi post-tradisi: Kajian filosofis atas permasalahan budaya abad ke-21*. PT Kanisius.
- Trimulato, Trimulato, Syamsu, Nur, & Octaviany, Mega. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38.
- Wahanisa, Rofi, & Adiyatma, Septhian Eka. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118.
- Wajdi, Farid, & Lubis, Suhwardi K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Winkel, Georg, Galloway, Glenn, Colfer, Carol J. Pierce, de Jong, Wil, Katila, Pia, & Pacheco, Pablo. (2019). The impacts of the sustainable development goals on forests and people—Conclusions and the way forward. *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People*, 601–617.

Copyright holder:

Aji Damanuri, Eva Rosyidah (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

